

BAB V

KESIMPULAN

Investasi asing di Batam meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan oleh posisi Batam yang cukup strategis, yakni berada dekat dengan negara tetangga yang tergolong maju, yaitu Singapura. Hal tersebut membuat Batam memiliki potensi besar sebagai tujuan investor asing dan sebagai wilayah perdagangan, meski Batam tidak memiliki potensi pertanian ataupun pertambangan. Perkembangan industri di kota Batam, dimulai sejak perencanaan pembangunan kota Batam hingga menjadi wilayah industri yang cukup dikenal memakan waktu cukup lama dengan konsep pembangunan yang menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, hingga Batam ditetapkan menjadi kawasan perdagangan bebas, dan akhirnya mengundang banyak investor asing, hingga membuat angka investasi asing di Batam cukup tinggi. Angka investasi asing yang tinggi ditandai dengan banyaknya jumlah perusahaan asing yang berdiri di Batam.

Nilai investasi asing yang tinggi mendatangkan keuntungan bagi sebuah negara, pada umumnya, dan daerah pada khususnya. Kehadiran investasi asing dengan wujud perusahaan-perusahaan diharapkan dapat membantu pembangunan suatu wilayah dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Namun, ternyata sebaliknya. Dalam proses pembangunan, beberapa masalah timbul dan menjadi bagian dalam proses pembangunan tersebut. Masalah-masalah seperti masalah demografis, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pendirian rumah-rumah liar, menjadi masalah sosial-ekonomi yang tidak dapat hilang dari Batam, meski Batam dilirik oleh banyak investor asing. Kesenjangan ekonomi menjadi masalah

yang belum teratasi secara keseluruhan di Batam, hingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Masalah-masalah tersebut telah dipaparkan dengan menunjukkan jumlah penduduk dan kondisi kepadatan penduduk kota Batam yang cukup tinggi, dikarenakan arus migrasi penduduk dari luar Batam ke Batam setiap tahun semakin laju. Masalah ketenagakerjaan juga tidak luput dari perhatian. Tidak sedikit penduduk Batam yang tidak memiliki pekerjaan meskipun dalam usia produktif. Hal ini diakibatkan oleh tidak memadainya kemampuan yang dimiliki atau bahkan adanya sistem dari suatu perusahaan tempat mereka bekerja yang secara sepihak tiba-tiba memutus hubungan kerja, membuat para pekerja kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2015 cukup fenomenal karena angka pekerja yang di PHK tidak sedikit, menambah angka pengangguran di Batam. Tidak berhenti sampai disitu, penyebaran rumah liar yang kumuh juga cukup sulit diatasi, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah, namun lahan untuk tempat tinggal mulai menyempit. Penduduk dengan terpaksa membangun rumah-rumah seadanya diatas lahan yang tidak seharusnya dibangun dengan pemukiman. Akibatnya, hal tersebut tak jarang menghambat pembangunan infrastruktur dan lainnya. Gaya hidup yang dijalani di Batam adalah gaya hidup dengan ekonomi tinggi, mengingat Batam seringkali bersentuhan dengan pihak asing. Hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi sebagian masyarakat yang masih hidup pas-pasan dengan sandang, pangan, papan seadanya.

Beranjak dari manfaat yang seharusnya didapatkan dari tingginya angka investasi asing di suatu wilayah, muncul pertanyaan apa yang membuat investasi

asing malah tidak dapat menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di Batam. Berpegang pada kerangka berpikir yang sudah dipaparkan dalam bab I, maka setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan gagalnya investasi asing menyelesaikan masalah sosial-ekonomi di Batam secara menyeluruh, yakni:

- A. Kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan yang dijalankan dalam menghadapi neoliberalisme yang masuk ke Batam.
- B. Kurang pahamnya pemerintah terhadap pengaruh neoliberalisme yang masuk melalui tumbuh kembangnya industri manufaktur yang sebagian besar merupakan perwujudan investasi asing yang ditanamkan oleh pihak asing di kota Batam.

Jadi, yang terpenting dalam menghadapi dampak-dampak yang ditimbulkan dari globalisasi yang membawa neoliberalisme adalah peran pemerintah yang kuat untuk menjadi tameng dari dampak-dampak buruk yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kerugian bagi masyarakat.

Globalisasi bukanlah suatu fenomena yang hanya menimbulkan kerugian. Neoliberalisme yang dibawa oleh globalisasi mungkin memang berdampak tidak baik bagi negara-negara yang tidak memiliki tameng yang kuat, dalam hal ini melalui pemerintah, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dapat mengawasi pergerakan pihak asing, agar tidak menggerus kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan data dari tahun 2013 hingga 2015, kehadiran investasi asing di Batam, yang sudah berjalan selama 40 tahun lebih, sejak di mulainya proses

pembangunan di Batam di tahun 1970-an hingga 2015, tidak bisa mengatasi masalah sosial-ekonomi yang masih menggelayuti masyarakat di Batam.

Yang menjadi penyebab dari kegagalan investasi asing ini adalah kurang pemahannya pemerintah terhadap pengaruh neoliberalisme. Kebijakan investasi asing di Batam sangatlah berpihak pada asing. Peran pemerintah sebagai pelindung dan pengatur kebijakan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang dibawa oleh globalisasi yang membawa neoliberalisme tidaklah kuat, sehingga keuntungan dari dijalankannya mekanisme pasar bebas kebanyakan didapatkan oleh pihak asing, sedangkan cipratan keuntungan kepada masyarakat hanya sedikit sekali dan hal tersebut membuat masalah sosial-ekonomi di Batam tidak dapat diatasi oleh kehadiran investasi asing.

Pemerintah memiliki tugas penting dalam perekonomian, yakni, *pertama*, pemerintah bertugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Artinya, bahwa pemerintah diharapkan bisa mencegah serbuan berlebihan yang dilakukan pihak asing terhadap eksploitasi sumber daya manusia di Batam. *Kedua*, pemerintah bertugas melindungi sejauh mungkin setiap warga masyarakat dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga negara lain. Artinya, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi tindakan yang membawa kerugian sepihak bagi masyarakat Batam yang bekerja untuk perusahaan asing, seperti masalah pemutusan hubungan kerja sepihak yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan tidak hanya seorang, namun ribuan pekerja lokal. *Ketiga*, tugas untuk mengadakan serta mempertahankan prasarana publik dan berbagai lembaga publik yang ada bukan hanya bagi kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Artinya, pemerintah Batam harus

memperhatikan kebijakan yang dijalankan terkait kebijakan-kebijakan investasi, apakah kebijakan tersebut memberikan keuntungan pada pihak investor saja atau dapat memberikan keuntungan pula pada masyarakat.